

**Permasalahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Studi Kasus:
Ketidaknetralan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah ketidaknetralan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu dengan studi kasus pada seleksi anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya dugaan praktik nepotisme dan patrimonialisme yang memengaruhi objektivitas proses seleksi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil temuan mengindikasikan bahwa ketidaktransparanan dalam pengumuman nilai CAT, kecenderungan keputusan berbasis kedekatan personal, serta pelanggaran etika seleksi merupakan bukti kuat ketidaknetralan tim seleksi. Analisis teori Max Weber tentang patrimonialisme menjadi pisau analisis dalam memahami relasi kuasa dan loyalitas pribadi dalam proses birokrasi publik. Implikasi dari temuan ini mencakup melemahnya kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen dan tergerusnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen anggota Bawaslu agar menjunjung prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas guna memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kata kunci: Bawaslu, ketidaknetralan, patrimonialisme, nepotisme, integritas pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu.

Election Organizer Recruitment Problems Case Study: The Non-Neutrality of the Bawaslu Member Selection Team for Nias Regency, North Sumatra Province in 2023

ABSTRACT

This study examines the problem of non-neutrality in the recruitment process of election organizers with a case study on the selection of Bawaslu Zone V members of South Nias Regency in 2023. This phenomenon indicates allegations of nepotism and patrimonialism practices that affect the objectivity of the selection process. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that the non-transparency in the announcement of CAT scores, the tendency for decisions based on personal closeness, and violations of selection ethics are strong evidence of the non-neutrality of the selection team. Max Weber's theoretical analysis of patrimonialism is an analytical tool in understanding the relationship of power and personal loyalty in the public bureaucratic process. The implications of these findings include the weakening of Bawaslu's credibility as an independent supervisory institution and the erosion of public trust in election integrity. Therefore, this study recommends a comprehensive reform of the Bawaslu member recruitment mechanism to uphold the principles of meritocracy, transparency, and accountability in order to strengthen the quality of local democracy in Indonesia.

Keywords: Bawaslu, non-neutrality, patrimonialism, nepotism, election integrity, election organizer recruitment.